



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 800 TAHUN 2018

TENTANG

**PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1429 Tahun 2017 tentang Penetapan Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan peta kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penerapan E-Learning dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;
15. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar;
16. Keputusan Gubernur Nomor 837 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2019.

- KESATU : Menetapkan Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengembangan kompetensi serta tugas belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Tahun 2018-2019.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018



ANIES BASWEDAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 800 TAHUN 2018
Tanggal 27 April 2018

DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	DIKLAT
A	Diklat Dasar
1	Diklat Character Building
2	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2)
3	Diklat Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III
B	Diklat Manajerial
1	Diklat Administrasi Kebijakan Publik
2	Diklat Analisis Kebijakan Publik
3	Diklat Capacity Building
4	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat JPT Pratama
5	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Administrator
6	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Pengawas
7	Diklat Kepemimpinan Tingkat II
8	Diklat Kepemimpinan Tingkat III
9	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
10	Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan
C	Diklat Teknis Umum
1	Diklat Analisa Kesenjangan Kompetensi
2	Diklat Analisis Beban Kerja (ABK)
3	Diklat Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
4	Diklat Standar Kompetensi Jabatan
5	Diklat Manajemen SDM
6	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis
7	Diklat Bendahara Penerimaan
8	Diklat Bendahara Pengeluaran
9	Diklat Verifikator Keuangan
10	Diklat Pengelolaan Barang Daerah
11	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
12	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
13	Diklat Penilaian Aset
14	Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
15	Diklat Manajemen Proyek
16	Diklat Manajemen Keuangan Daerah
17	Diklat Komunikasi Publik
18	Diklat Kehumasan
19	Diklat Keprotokolan
20	Diklat Public Speaking
21	Diklat Teknis Negosiasi dan Komunikasi
22	Diklat Bahasa Inggris Komunikasi
23	Diklat Desain Grafis

No	DIKLAT
24	Diklat Knowledge Management
25	Diklat Komputer
26	Diklat Pengembangan Sistem Informasi
27	Diklat Teknologi Jaringan
28	Diklat Web Design
29	Diklat Web Programing
30	Diklat Presentasi
31	Diklat Teknis Perundang-undangan
32	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum
33	Diklat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
34	Diklat Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
35	Diklat Penyusunan dan Penilaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
36	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
37	Diklat Penyusunan Rancangan Kontrak
38	Diklat Penyusunan Rancangan Program, Kegiatan dan Anggaran
39	Diklat Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Unit Kerja
40	Diklat Pelayanan Prima
41	Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
42	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD)
43	Diklat Public Private Partnership
44	Diklat Revolusi Mental
45	Diklat Reformasi Birokrasi
46	Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
47	Diklat Pembangunan Zona Integritas
48	Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas
D	Diklat Fungsional
1	Diklat Ahli Manajemen Perencanaan
2	Diklat Analis Kepegawaian
3	Diklat Arsiparis
4	Diklat Auditor
5	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja bagi Staf (Jabatan Fungsional)
6	Diklat Dasar Pranata Humas
7	Diklat Fungsional Instruktur
8	Diklat Fungsional Mediator Hubungan Industrial
9	Diklat Fungsional Peneliti
10	Diklat Fungsional Pengantar Kerja
11	Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
12	Diklat Fungsional Perencana
13	Diklat Fungsional Widyaiswara
14	Diklat Kependidikan
15	Diklat Penera
16	Diklat Pengawas Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Daerah (P2UPD)
17	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
18	Diklat Penyuluh KB
19	Diklat Penyuluh Pertanian
20	Diklat Penyusun dan Perancangan Perundang-undangan

No	DIKLAT
21	Diklat Pranata Komputer
22	Diklat Pustakawan
E	Diklat Teknis Substantif
1	Diklat Audit BUMD
2	Diklat Audit Investigasi
3	Diklat Audit Kesmas
4	Diklat Audit Pembangunan Konstruksi
5	Diklat Penyusunan dan Evaluasi SAKIP
6	Diklat Penyusunan dan Penilaian Rencana Tata Ruang Wilayah
7	Diklat Perencanaan Pembangunan Partisipatif
8	Diklat Dasar-Dasar Pengawasan Pemerintahan Daerah
9	Diklat Gladi Manajemen Pemerintahan Kelurahan
10	Diklat Gladi Manajemen Pemerintahan Tingkat Kota
11	Diklat Penataan Batas Wilayah
12	Diklat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
13	Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
14	Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Management
15	Diklat Teknis Strategi Penegakan Perda
16	Diklat Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan dan Layanan Publik
17	Diklat Pengembangan Kawasan Tertinggal
18	Diklat Asesor
19	Diklat Talent Management
20	Diklat Management of Training (MOT)
21	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara
22	Diklat Penulisan Kurikulum dan Modul
23	Diklat Training of Course (TOC)
24	Diklat Training of Facilitator (TOF)
25	Diklat Training of Trainer (TOT) Substantif Mata Ajar
26	Diklat Kurikulum dan Konten Mata Pelajaran
27	Diklat Manajemen Bencana
28	Diklat Mitigasi Bencana
29	Diklat Inspektur Kebakaran
30	Diklat Inspektur Mitigasi Bencana dan Kebakaran
31	Diklat Pengawasan Mitigasi Bencana Kebakaran
32	Diklat Administrasi Pemeriksaan Daerah
33	Diklat Juru Sita
34	Diklat Penilai Pajak
35	Diklat Bina Damai
36	Diklat Pembinaan Kesatuan Bangsa
37	Diklat Perlindungan Masyarakat
38	Diklat Administrasi Kependudukan Tingkat Dasar
39	Diklat Penanggulangan Kebakaran
40	Diklat Android Fundamental (Pemograman)
41	Diklat Big Data Analisis (Database)
42	Diklat CCNA R&S 1
43	Diklat CGEIT
44	Diklat CISA

No	DIKLAT
45	Diklat CISM
46	Diklat Data Base IT
47	Diklat Data Quality Management
48	Diklat Jaringan Komputer (Network)
49	Diklat Java Enterprise Edition (Aplikasi)
50	Diklat Linux Administration (Sistem Operasi)
51	Diklat Network Administration
52	Diklat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
53	Diklat PHP dan Mysql Fundamental (Aplikasi)
54	Diklat PostgreSQL (Database)
55	Diklat Statistik Sektoral
56	Diklat System Analist
57	Diklat System Testing Foundation
58	Diklat Kewirausahaan
59	Diklat Management Ekspor Impor
60	Diklat Manajemen Komunikasi Kepada Pelaku Usaha Binaan
61	Diklat Mentor Pembentukan Karakter para Pelaku Usaha Binaan
62	Diklat Motivator untuk Pengembangan Usaha dan para Pelaku Usaha Binaan
63	Diklat Penataan Layout Lokasi PKL
64	Diklat Penyuluh Koperasi
65	Diklat Strategi Pengembangan Kewirausahaan/Oke-OCe
66	Diklat Marketing Analysis
67	Diklat Mediator Hubungan Industri
68	Diklat Kepariwisata
69	Diklat Instruktur Layanan Permuseuman/Objek Wisata
70	Diklat Instruktur Tari Budaya Betawi
71	Diklat Pemandu Wisata
72	Diklat Konservasi Kearsipan
73	Diklat Kereta Api Perkotaan Tingkat Dasar
74	Diklat Kereta Api Perkotaan Tingkat Lanjutan
75	Diklat Kompetensi Ka. Sat Pel Terminal Bus Tipe A
76	Diklat Orientasi Perkeretaapian
77	Diklat Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
78	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 1
79	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 2
80	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 3
81	Diklat Kepelabuhanan
82	Diklat Navigasi
83	Diklat Instruktur Ketenagakerjaan
84	Diklat Pengawas Ketenagakerjaan
85	Diklat Dasar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
86	Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi
87	Diklat Arc GIS
88	Diklat Metode Kelaikan Bangunan Gedung
89	Diklat Penataan Ruang Daerah
90	Diklat Pengawas Konstruksi
91	Diklat Perencanaan IPTB
92	Diklat Pengawasan Bangunan Gedung
93	Diklat Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan

No	DIKLAT
94	Diklat Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung
95	Diklat Penyusunan RAB Pembangunan Gedung
96	Diklat Administrasi Pertanahan
97	Diklat Teknis Pertanahan
98	Diklat Konflik Pertanahan
99	Diklat Manajemen Kontruksi
100	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan
101	Diklat Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan
102	Diklat Perencanaan Jalan dan Jembatan
103	Diklat Pemeriksa Tata Bangunan dan Perumahan
104	Diklat Pemeriksaan dan Perawatan Rusunawa
105	Diklat Pengawas Teknik Lingkungan
106	Diklat Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan
107	Diklat Pengawasan Tata Air
108	Diklat Perencanaan Pengembangan Kawasan Gedung
109	Diklat Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung
110	Diklat Hukum Konstruksi
111	Diklat Hukum Kontrak
112	Diklat Hukum Perhubungan
113	Diklat Penanganan Sengketa Hukum
114	Diklat Surveyor
115	Diklat Teknis Pertamanan
116	Diklat Dasar-Dasar AMDAL
117	Diklat Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL)
118	Diklat Pengawas Lingkungan Hidup
119	Diklat Pengelolaan Persampahan Perkotaan
120	Diklat Pengendali Dampak Lingkungan
121	Diklat Penilai Adipura
122	Diklat Manajemen Sekolah
123	Diklat Calon Kepala Sekolah
124	Diklat Pengawas Sekolah
125	Diklat Bahasa Asing bagi Guru
126	Diklat Pamong Belajar
127	Diklat Penilik Sekolah
128	Diklat Pelatihan Calon Laboran
129	Diklat Pelatihan Calon Pustakawan
130	Diklat Instruktur Layanan Penyandang Disabilitas
131	Diklat Pekerja Sosial
132	Diklat Penyuluh Sosial
133	Diklat Penyuluh Agama
134	Diklat Penyuluh Masyarakat
135	Diklat Pendampingan Psikososial
136	Diklat Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial
137	Diklat ACLS (Advanced Cardiac Life Support)
138	Diklat Advance Capriscopi
139	Diklat Akreditasi MKI
140	Diklat Akses Vascular
141	Diklat AO
142	Diklat APN

No	DIKLAT
143	Diklat ARSADA
144	Diklat Aseptic Dispensing
145	Diklat ATLS
146	Diklat Audiometri
147	Diklat BCLS
148	Diklat BTLS
149	Diklat Business Analysis
150	Diklat Business Writing
151	Diklat Casemix
152	Diklat Clinical Instructor
153	Diklat Coding Penyakit dan Tindakan
154	Diklat Cool Chain/Vaksin
155	Diklat CSSD
156	Diklat CTU
157	Diklat Defensive Diving
158	Diklat Desain Formulir
159	Diklat EKG
160	Diklat Emergency Neonatus
161	Diklat Emergency Nursing
162	Diklat Farmasi Klinik
163	Diklat FCSS (Fundamental Critical Care Support)
164	Diklat GELS (General Emergency Life Support)
165	Diklat HIV
166	Diklat Hukum Kesehatan
167	Diklat ICU (Intensive Care Unit)
168	Diklat Keterampilan Dasar Bagi Perawat Kamar Bedah
169	Diklat Keterampilan Klinis
170	Diklat Komite Keperawatan
171	Diklat Kongres Sterilisasi Sentral ke III
172	Diklat Konselor HIV
173	Diklat Konselor Laktasi
174	Diklat Manajemen Obat Narkotika, Psikotropik dan Prekursor
175	Diklat Manajemen BLUD
176	Diklat Manajemen Bangsal
177	Diklat Manajemen HCU (High Care Unit)
178	Diklat Manajemen Kamar Jenazah
179	Diklat Manajemen Kamar Operasi
180	Diklat Manajemen Keuangan Rumah Sakit
181	Diklat Manajemen Laktasi
182	Diklat Manajemen Logistik Obat dan Vaksin
183	Diklat Manajemen Rekam Medis Rumah Sakit
184	Diklat Manajemen Unit Gawat Darurat (UGD)
185	Diklat Manajemen Unit Rawat Inap
186	Diklat Manajemen Unit Rawat Jalan
187	Diklat Modifikasi Formula Enteral Rumah Sakit
188	Diklat NCP dan Food Service
189	Diklat Pediatric Intensive Care Unit (PICU)
190	Diklat Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
191	Diklat Pasien Safety

No	DIKLAT
192	Diklat Pelatih Pemberdayaan Masyarakat
193	Diklat Pelatihan Ahli K3 Umum
194	Diklat Pelatihan Kamar Operasi Dasar
195	Diklat Pelatihan Pelayanan pada Pasien
196	Diklat Pelatihan Phlebotomy
197	Diklat Pelatihan Quality Control
198	Diklat Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk
199	Diklat Pelatihan TB BTA
200	Diklat Pelatihan Triage
201	Diklat Pelatihan VCT/IMS
202	Diklat Pemasaran Rumah Sakit
203	Diklat Pembimbing Klinik
204	Diklat Penanganan Pencabutan Gigi Kompleks
205	Diklat Penatalaksanaan Trauma Muskuloskeletal Terkini Secara Komprehensif di Indonesia
206	Diklat Penyusunan Pola Ketenagaan
207	Diklat Perawatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPCN) Tingkat Lanjut
208	Diklat Perinatologi
209	Diklat PPGD-ON
210	Diklat Program Proteksi Radiasi
211	Diklat Quality Insurance
212	Diklat Quantity Surveyor
213	Diklat Resusitasi Neonatus
214	Diklat Sistem Informasi Laboratorium
215	Diklat Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
216	Diklat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
217	Diklat Pemberdayaan Masyarakat



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 800 TAHUN 2018
Tanggal 27 April 2018

DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	BIMBINGAN TEKNIS
1	Bimtek Akreditasi
2	Bimtek Gerakan Revolusi Mental
3	Bimtek Pengelolaan Barang Daerah
4	Bimtek Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
5	Bimtek Pajak bagi Manajemen Rumah Sakit
6	Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas
7	Bimtek Sistem dan Strategi Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
8	Bimtek Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Bimtek Strategi serta Strategi Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
10	Bimtek Tunjangan Kinerja Daerah
11	Bimtek Mitigasi Pencegahan Kebakaran
12	Bimtek Sarana Pencegahan Kebakaran
13	Bimtek Pengelolaan Aset
14	Bimtek Manajemen Resiko
15	Workshop Profesionalisme ASN bagi Tenaga Pendidik



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 800 TAHUN 2018

Tanggal 27 April 2018

DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROGRAM
STUDI D4/S1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Program Studi (D4/S1)
A	ILMU SAINS
1	Ilmu Komputer/Informatika
2	Sandi Negara
3	Sistem Informasi
B	KESEHATAN
1	Keperawatan
2	Kebidanan
C	TEKNIK
1	Desain Grafis
2	Perencanaan Wilayah dan Kota
3	Teknik Elektro
4	Teknik Geologi
5	Teknik Industri
6	Teknik Kelautan
7	Teknik Kimia
8	Teknik Lingkungan
9	Teknik Mesin
10	Teknik Sipil
11	Teknologi Informasi
12	Teknik Transportasi
13	Teknik Pertamanan
14	Teknik Keolahragaan
D	SOSIAL
1	Administrasi Negara
2	Administrasi Perpajakan
3	Akuntansi
4	Hukum
5	Kesejahteraan Sosial
6	Komunikasi
7	Manajemen/Bisnis
8	Perpustakaan
9	Teknologi Pendidikan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 800 TAHUN 2018

Tanggal 27 April 2018

DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROGRAM
STUDI S2 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Program Studi (S2)
A	ILMU SAINS
1	Statistika
2	Ilmu Komputer/Ilmu Komputasi/Informatika
3	Sistem Informasi
B	KESEHATAN
1	Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit
2	Kesehatan Masyarakat
C	TEKNIK
1	Arsitektur Lanskap
2	Ilmu Keolahragaan
3	Manajemen dan Rekayasa Konstruksi
4	Mitigasi Bencana
5	Perencanaan Wilayah dan Kota
6	Teknik Air Tanah
7	Teknik Elektro
8	Teknik Geologi
9	Teknik Informatika
10	Teknik Kelautan/Ilmu Kelautan
11	Teknik Kimia
12	Teknik Lingkungan
13	Teknik Sipil
14	Transportasi
D	PERTANIAN
1	Kehutanan
2	Peternakan
E	SOSIAL
1	Administrasi dan Kebijakan Publik
2	Akuntansi
3	Antropologi
4	Arkeologi
5	Bahasa Inggris
6	Bimbingan Konseling
7	Ekonomi dan Bisnis
8	Estate Manajemen
9	Evaluasi Pendidikan

No	Program Studi (S2)
10	Hukum
11	Hukum Agraria
12	Ilmu Komunikasi
13	Kajian Pariwisata
14	Komunikasi Pembangunan
15	Linguistik
16	Manajemen Aset dan Penilaian Properti
17	Manajemen Bisnis
18	Manajemen Pendidikan
19	Manajemen Sumber Daya Manusia
20	Pembangunan Sosial
21	Pemerintahan
22	Pendidikan Luar Biasa
23	Pengembangan Kurikulum
24	Perpajakan
25	Perpustakaan
26	Psikologi
27	Sejarah
28	Teknik Manajemen Sumber Daya Air
29	Teknologi Pendidikan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



James Baswedan

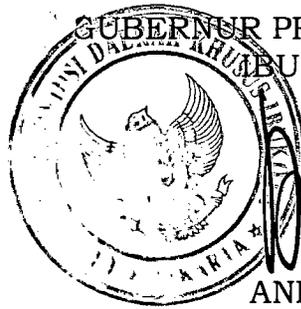
JAMES BASWEDAN

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 800 TAHUN 2018
Tanggal 27 April 2018

DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SPESIALIS
· BIDANG PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Spesialis Bidang Profesi
A	KESEHATAN
1	Spesialis Bedah
2	Spesialis Kesehatan Anak
3	Spesialis Penyakit Dalam
4	Spesialis Obstetri dan Ginekologi
5	Spesialis Patologi Klinis
6	Spesialis Farmakologi Klinis
7	Spesialis Anastesi



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran VI : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 800 TAHUN 2018
Tanggal 27 April 2018

DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROGRAM
STUDI S3 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Program Studi (S3)
1	Perencanaan Wilayah dan Kota
2	Ekonomi dan Studi Pembangunan
3	Manajemen dan Kebijakan Publik

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN